**LAPORAN KINERJA**

**KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN**

**TAHUN 2022**



**KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN**

**TAHUN 2022**

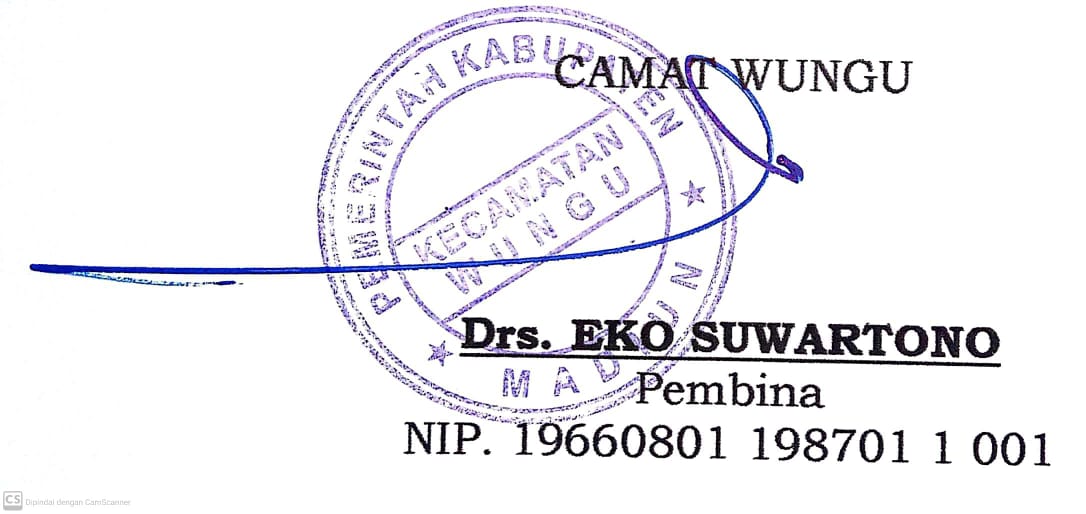
**KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Kecamatan Wungu merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Wungu Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Wungu Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Wungu. Kinerja Kecamatan Wungu diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Wungu Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civilsociety* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Wungu Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Wungu pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerahsecara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Madiun, 27 Februari 2023

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

* 1. Struktur Organisasi 2
  2. Tugas dan Fungsi 4
  3. Isu Strategis Perangkat Daerah 15
  4. Landasan Hukum 16
  5. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi 17

BAB II PERENCANAAN KINERJA 19

* 1. Rencana Strategis Perangkat Daerah 19
  2. Rencana Kerja Tahun 2022 25
  3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 33

* 1. Capaian Kinerja Organisasi 35
  2. Analisis Penggunaan Anggaran 45
  3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Th. 2022 47

BAB IV PENUTUP 50

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

LAPORAN HASIL EVALUASI

LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

        Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

        Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

        Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Wungu  selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

        Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

        Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Wungu  Kabupaten Madiun diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

* 1. **Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

        Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Jabatan Struktural Kantor Kecamatan Kabupaten Madiun. Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakaan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
6. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
8. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Sub Bagian. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

### Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN WUNGU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | **C A M A T** | | | | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL** | |  | |  | |  | |  | | | | **SEKRETARIS CAMAT** | | |  |  | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | | |  | **SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN** | | |  | | **SUBAG. KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN** | | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| **SEKSI TATA PEMERINTAHAN DESA/KEL** | | |  | **SEKSI**  **TRANTIB** | | |  | | **SEKSI**  **PMP** | | |  | | **SEKSI**  **KESOS** |  | | **SEKSI PELAYANAN** | | | | |

*Sumber : Peraturan Bupati Madiun No. 60 Tahun 2016*

Struktur kelembagaan atau organisasi Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Madiun, Jabatan Struktural Kantor Kecamatan Kabupaten Madiun sebagai berikut:

1. Camat;

2. Sekretariat terdiri dari ;

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan;

3. Seksi Tata Pemerintahan Desa/ Kelurahan;

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

7. Seksi Pelayanan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Madiun, Jabatan Struktural Kantor Kecamatan Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

### 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Camat.

* + 1. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:
       1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
       2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
       3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
       4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
       5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
       6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
       7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
    2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputiaspek:
       1. Perizinan.
       2. Rekomendasi.
       3. Koordinasi.
       4. Pembinaan.
       5. Pengawasan.
       6. Fasilitasi.
       7. Penetapan.
       8. Penyelenggaraandan
       9. Kewenangan lain yang dilimpahkan
    3. Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimaan tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
2. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaanmasyarakat.
3. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
5. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan.
9. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pascabencana.
10. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertahanan dan kependudukan di Kecamatan.
11. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Kecamatan.
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Kecamatan.SekretarisKecamatan

* + 1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan kepegawaian keuangan penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
    2. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan sekretariat.
2. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.
3. Pengelolaan urusan keuangan.
4. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian.
5. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
6. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan.
7. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Kepala Desa/ Lurah.
8. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.
9. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
    * 1. Sekretariat Kecamatan terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan,
       1. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
11. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
    1. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaran pelayanan di Kecamatan
    2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan.
    3. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
    4. Melaksanakan ketatausahaan Kantor
    5. Melaksanakan administrasi kepegawaian.
    6. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah.
    7. Melaksanakan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainya yang ada di wilayah Kecamatan
    8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan, mempunyai tugas:
    1. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan
    2. Menghimpun dan mengelola data keuangan program dan pelaporan
    3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan program dan pelaporan
    4. Mengelola keuangan Kecamatan.
    5. Melakukan koordinasi kegiatan antar seksi dalam rangka pelaksanaan penyusunan program evaluasi danpelaporan.
    6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi :**

### Seksi Tata Pemerintahan Desa/ Kelurahan

* + 1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang pemerintahan.
    2. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Tata Pemerintahan Desa/ Kelurahan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan bidangpemerintahan.
2. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahanumum.
3. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahanDesa/Kelurahan
4. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan
5. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa Terpilih dan/atau penjabat sementara.
6. Pelaksanaan pemrosesan usulan sekretaris desa dan / atau Pejabat sementara
7. Pengkoordinasian administrasi pertanahan.
8. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan.
9. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa
10. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa , Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayahkerjanya.
11. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa penyusunan anggaran dan pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kerja sama antar desa serta penyelesaian perselisihan antar desa.
12. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah Negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai degan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa di dalam wilayah kerjanya.
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

* + 1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
    2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum Dan perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan koordinasi ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
4. Pelaksanaan tugan pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lannya diwilayah kerjanya.
5. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
6. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum.
7. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan.
8. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pelaksanaan pemantauan pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makluk hdup dan kelestarian lingkungan.
10. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya.
11. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam, dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

* + 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan urusan di bidang ekonomi
    2. Seksi Pemberdayaan Masyarakatdan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

* 1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
  2. Menyiapkan data pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
  3. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
  4. Melaksanakan fasilitas dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
  5. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan;
  6. Melaksanaan kordinasi pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan program kerja perangkat daerah, instansi vertikal maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kerja kecamatan;
  7. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perekonomian di kecamatan;
  8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan; dan
  9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

**Seksi Kesejahteraan Sosial**

* + 1. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu camat melaksanakan urusan di bidang kemasyarakatan.
    2. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

* 1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Kesejahteraan Sosial;
  2. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit menular;
  3. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan ;
  4. Melaksanakan koordinasi, pendataan dan pemantauan penyaluran bantuan sosial;
  5. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga;
  6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Kesejahteraan Sosial di Kecamatan kepada Bupati;dan
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**Seksi Pelayanan**

* + 1. Seksi Pelayanan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan urusan di bidang kemasyarakatan.
    2. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

* 1. Melaksanakan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pelayanan;
  2. Melaksanakan penyusunan, pengolahan, dan pemeliharaan data dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
  3. Melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan (standar pelayanan prima) kepada masyarakat;
  4. Mengkoordinasikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik di wilayahnya;
  5. Melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat;
  6. Melaksanakanpengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan masyarakat ;
  7. Melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat;
  8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan;dan
  9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

**Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

* + - 1. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari  
         sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional  
         yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan  
         keahliannya.
      2. Setiap kelompok Jabatan Fungsional di koordinasikan oleh  
         seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan  
         bertanggungjawab kepada Camat.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta rincian  
tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan  
perundang-undangan.

**1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Wungu periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Memasuki era globalisasi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Bentuk respon tuntutan tersebut adalah munculnya aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) amanat yang perlu dilakukan adalah melakukan kajian kualitas layanan publik untuk menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai perwujudan Good Governance dalam bentuk akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab kebutuhan masyarakat. Selaku penyelenggara Pelayanan publik, dimana seharusnya bisa memberikan pelayanan secara akurat, cepat, tepat dan akuntabel, namun pada kenyataannya masih belum bisa memberikan pelayanan seperti yang diharapkan tersebut di atas, hal ini disebabkan kualitas/ profesionalisme aparatur pemerintahan baik kecamatan maupun desa masih rendah / kurang produktif.
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya usaha untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya aparatur.
3. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha diwilayah. Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha yang masih sangat minim dalam penyelenggaraan pembangunan utamanya pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh– sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Kecamatan Wungu periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan secara akurat, cepat, tepat dan akuntabel.
2. Peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya aparatur.
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha diwilayah Kecamatan Wungu.
   1. **Landasan Hukum**

       Laporan Kinerja Kecamatan Wungu ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

* 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  6. Peraturan Bupati Madiun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
  7. Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
  8. Perbup Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kecamatan.
  9. **Ringkasan LHE SAKIP Kecamatan Wungu Tahun 2022**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Nomor 790/1768/402.060/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Kecamatan Wungu pada tahun 2022 memproleh nilai sebesar 75,03 dengan beberapa catatan di antaranya :

1. Masih adanya ketidaksesuaian sasaran dan indikator sasaran yang diperjanjikan pada dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Perubahan Renstra.
2. Masih perlunya koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun terkait penentuan target nilai SAKIP Kecamatan yang realistis untuk dicapai.
3. Masih perlunya koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terkait keseragaman formula perhitungan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi maka diperlukan penyesuaian dalam pengumpulan, pengukuran data kinerja, serta evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah internal Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dalam suatu sistem teknologi informasi.
5. Masih perlunya penyempurnaan penyusunan dokumen LkjIP Tahun 2021 sesuai dengan Permenpan No. 53 Tahun 2014 dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, efisiensi serta kecermatan dalam menghitung efisiensi yang te;ah dilakukan.
6. Masih perlunya peningkatan kualitas evaluasi internal dan laporan kinerja dengan menggali informasi ke penanggung jawab kegiatan/sub kegiatan terkait hambatan yang ada dalam pelaksanaan kinerja kegiatan dan merumuskan solusi/tindak lanjutnya.

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

* 1. **Rencana Strategis**

        Rencana Strategis Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Rencana Strategis Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

        Renstra Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

        Penyusunan Renstra Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Wungu  Kabupaten Madiun merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan stakeholder.

        Selanjutnya, Renstra Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Wungu  Kabupaten Madiun dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

* 1. **Visi**

        Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.

Visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah:

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK ‘.

* 1. **Misi**

        Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Misi 1 : | Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun; |
| Misi 2 : | Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik; |
| Misi 3 : | Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan; |
| Misi 4 : | Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan; |
| Misi 5 : | Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal. |

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Wungu mengacu pada Misi ke-II, yaitu :Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan public.

* 1. **Tujuan dan Sasaran**

        Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

        Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran strategis.

        Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran , Indikator dan Target Kinerja

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Sebelum Perubahan | | | | | | | | | | |
|  | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) untuk Pelayanan Publik |  | Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kecamatan | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Persentase layanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | Persentase layanan bidang Administrasi Kecamatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | Nilai SAKIP Kecamatan A | A | A | A | A | A | A | A |
| Setelah Perubahan | | | | | | | | | | |
|  | Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas. |  | Indeks Kepuasan Masyarakat . | 0 | 0 | 0 | 81,95 | 83,95 | 86,20 | 86,20 |
|  |  | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | 0 | 0 | 0 | 78 | 79 | 80 | 80 |
|  |  |  | Nilai Sakip Kecamatan. | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 |

*Sumber :Renstra* Kecamatan Wungu  *periode 2018-2023*

* 1. **Indikator Kinerja Utama**

        Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

        Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama  
Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | | **SATUAN** | **PENJELASAN** | | |
| **ALASAN** | **FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN** | **SUMBER DATA** |
| 1. | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan | 1.1. | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Nilai | Mendukung Pencapaian target IKM Kabupaten | Hasil Survey Layanan yang dilaksanakan. | Kecamatan Wungu |
|  |  | 2.1 | Nilai SAKIP Kecamatan . | Nilai | Mendukung Pencapaian target Nilai Sakip Kabupaten | Nilai SAKIP OPD yang di nilai oleh Inspektorat | Inspektorat |

*Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wungu Tahun 2022*

* 1. **Rencana Kerja Tahun 2022**

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Wungu Tahun 2022 :

**Tabel 2.3  
Rencana Kinerja Tahun 2022  
Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | | **INDIKATOR KINERJA** | **SAT.** | **TARGET** |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas. |  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat . | Nilai | 83,95 |
|  |  | 1.1 | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Nilai | 79 |
|  |  |  |  | Nilai Sakip Kecamatan. | Nilai | 84 |

*Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun tahun 2022*

* 1. **Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

        Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Wungu  Kabupaten Madiun telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

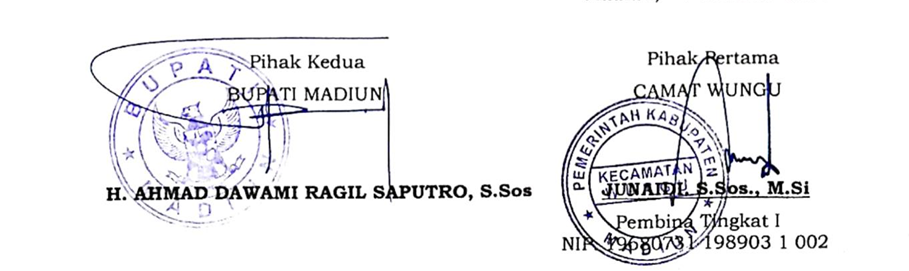
PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN ANGGARAN 2022

KECAMATAN WUNGU

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| 1. | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | 79 |
|  |  | Nilai SAKIP Kecamatan Wungu | 84 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program** | **Anggaran** | |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 4.325.310.997 |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. | 6.201.000 |
| 3. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. | 38.773.388 |
| 4. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp. | 54.462.800 |
| 5. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp. | 34.864.500 |
| 6. | Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. | 50.000.000 |
|  | JUMLAH | Rp. | 4.459.612.685 |

Caruban, 3 Januari 2022

Pihak Kedua, Pihak Pertama

BUPATI MADIUN CAMAT WUNGU

H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos JUNAIDI,S.Sos.M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19680731 198903 1 002

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Wungu :

**Tabel 2.5**

**Program dan Kegiatan Kecamatan Wungu Tahun 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROGRAM/ KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** | **ANGGARAN** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 84 | 4.325.310.997 |
|  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | 79 |  |
|  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum |  |  |
|  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 54.462.800 |
|  | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 Persen | 34.864.500 |
|  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan | 100 Persen | 6.201.000 |
|  | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 100 Persen | 38.773.388 |
|  |  |  |  |  |

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022*

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

* + - * Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
      * Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
      * Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
      * Pada tanggal 2 bulan November tahun 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.6**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN – APBD TAHUN ANGGARAN 2022

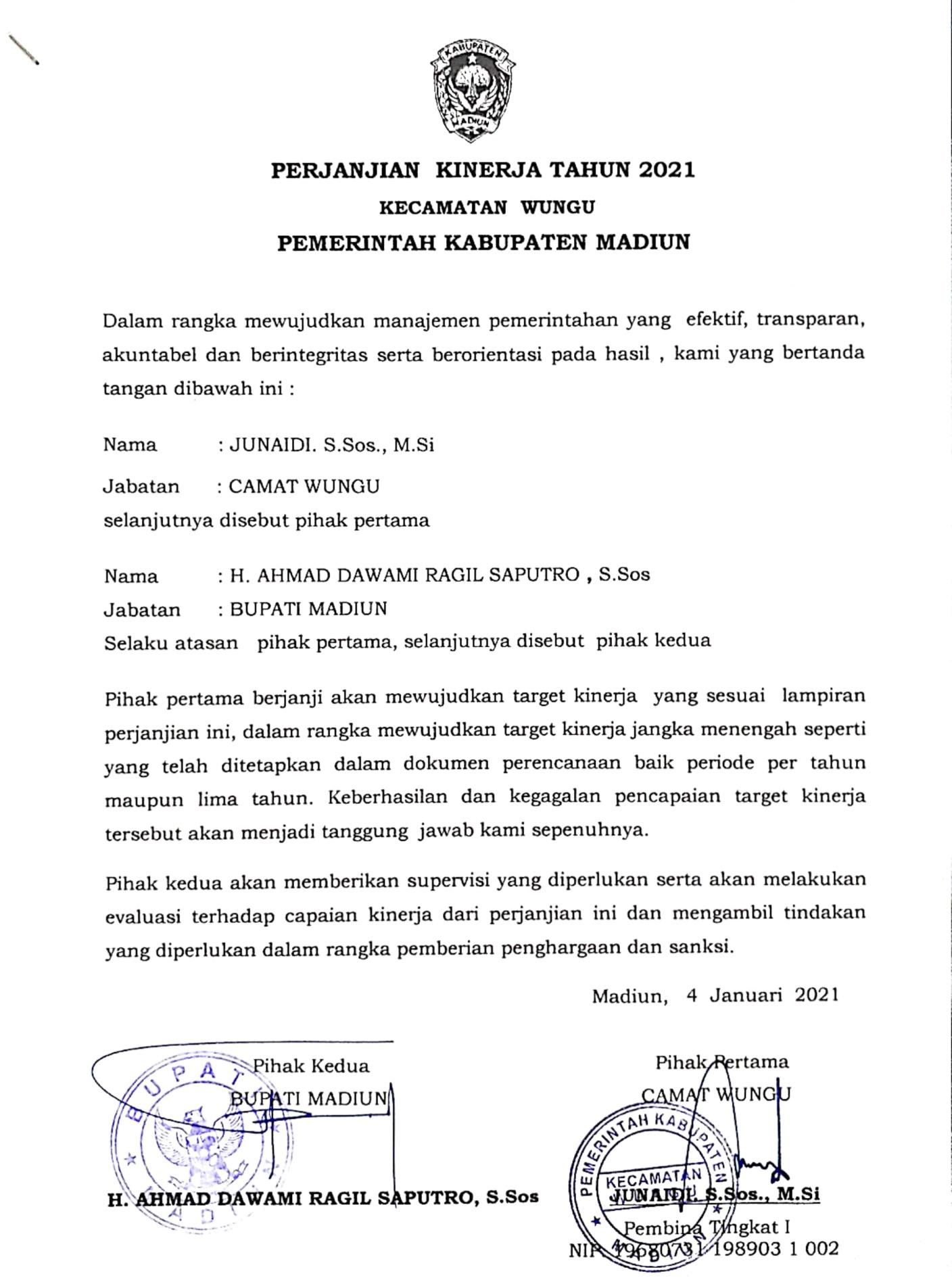
KECAMATAN WUNGU

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| 1. | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan | 79 |
|  |  | Nilai SAKIP Kecamatan Wungu | 84 |

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Program** | **Anggaran** | |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 3.423.021.610 |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. | 6.207.024 |
| 3. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. | 86.906.088 |
| 4. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp. | 49.397.800 |
| 5. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp. | 41.378.729 |
| 6. | Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. | 50.000.000 |
|  | JUMLAH | Rp. | 3.972.845.685 |

Caruban, 2 November 2022

Pihak Kedua, Pihak Pertama

BUPATI MADIUN CAMAT WUNGU

H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos JUNAIDI,S.Sos.M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19680731 198903 1 002

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.7**

**Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Wungu Tahun 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROGRAM/ KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** | **ANGGARAN** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 84 | 3.423.021.610 |
|  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | 79 |  |
|  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 6.207.024 |
|  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Layanan Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 100 Persen | 86.906.088 |
|  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan | 100 Persen | 49.397.800 |
|  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 Persen | 41.378.729 |
|  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100 persen | 50.000.000 |

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 (setelah perubahan)*

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

        Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

        Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

        Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

        Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Pengkategorian Capaian Kinerja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kategori/Interpretasi** | **Rata-Rata % Capaian** |
| 1 | Sangat Baik | 120 ≥ X > 100 |
| 2 | Baik | X = 100 |
| 3 | Cukup | 80 < X < 100 |
| 4 | Kurang | 50 ≤ X ≤ 80 |
| 5 | Sangat Kurang | X < 50 |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

        Dalam laporan ini, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Wungu Tahun  2022 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wungu.

* 1. **Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Kecamatan Wungu Tahun 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tujuan/ Sasaran** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian %** | **Kategori** | **Sumber Data** |
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas. | Indeks Kepuasan Masyarakat . | 81,95 | 82,24 | 100,35% | Sangat Baik | Bagian Organisasi Kab. Madiun |
| 2 | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | 79 | 86,30 | 109% | Sangat Baik | Hasil Survey Kecamatan dari E-Sukma |
|  |  | Nilai Sakip Kecamatan. | 84 | 75,03 | 89,32 | Baik | Inspektorat |

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan table tersebut di atas dapat diketahui bahwapencapaian sasaran kinerja Kantor Kecamatan Wungu dengan indikator sasaran IKM Kecamatan sudah mencapai target, namun pada Indikator Nilai Sakip Kecamatan masih mencapai 89,32% yang berarti target pada indikator sasaran 2 belum tercapai meskipun sudah dalam kategori Baik.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**

**Perbandingan Capaian Kinerja**

| **NO.** | **SASARAN / INDIKATOR** | **CAPAIAN**  **REALISASI**  **TH. 2018** | **TARGET 2019** | **REALISASI 2019** | **%CAPAIAN 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***A*** | Meningkatnya kualitas pelayanan publik |  |  |  |  |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Target B | 87 | 80 | 89 | 89 |
| ***B*** | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan |  |  |  |  |
| 1 | Nilai Sakip Kecamatan Wungu, target A | 60,78 | 81 | 69,87 | 69,87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tujuan/Sasaran** | **Indikator Kinerja** | **Capaian 2020** | **2021** | | | **2022** | | |
| **Target** | **Realisasi** | **% Capaian** | **Target** | **Realisasi** | **% Capaian** |
|  | Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas. | Indeks Kepuasan Masyarakat | **80,10 %** | 81,95 | 82,24 | 100,35 % | 81,95 | 82,24 | 100,35 % |
|  | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | **106 %** | **78** | **83** | **106 %** | 79 | 86,36 | **109%** |
|  |  | Nilai Sakip Kecamatan. | **85,20 %** | **83** | **80,30** | **96,74 %** | 84 | 75,03 | **98,32%** |

Uraian penjelasan tabel :

Realisasi Capaian kinerja tahun 2022 nilai IKM sebesar 82,24 dan nilai IKM Kecamatan sebesar 86,36 sudah mencapai target dikarenakan pelaksanaan peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pelayanan kecamatan bisa dilaksanakan dengan baik, dari penanganan pelayanan yang lebih cepat dari sebelumnya dan fasilitas ruang tunggu yang lebih memadai. Untuk penilaian SAKIP masih sebesar 75,03 disebabkan karena ada indikator penilaian yang belum dapat ditindaklanjuti yaitu penyusunan sistem teknologi informasi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja internal kecamatan.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**

**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tujuan/Sasaran** | **Indikator Kinerja** | **Realisasi Kinerja Tahun 2022** | **Target Akhir 2023** | **Tingkat Kemajuan** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=4/5\*100** |
|  | Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas. | Indeks Kepuasan Masyarakat . | 82,24 | **86,20** | **95,40** |
|  | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | 86,36 | **80** | **107,95** |
|  |  | Nilai Sakip Kecamatan. | 75,03 | **85** | **88,27** |

Uraian penjelasan tabel :

Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 nilai IKM sebesar 82,24 dan 86,36 atau sudah mencapai target dikarenakan pelaksanaan peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pelayanan kecamatan bisa dilaksanakan dengan baik, dari penanganan pelayanan yang lebih cepat dari sebelumnya dan fasilitas ruang tunggu yang lebih memadai. Untuk penilaian SAKIP masih sebesar 75,03 disebabkan karena ada indikator penilaian yang belum dapat ditindaklanjuti yaitu penyusunan sistem teknologi informasi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja internal kecamatan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**

**Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten Madiun**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tujuan/Sasaran** | **Indikator Kinerja** | **Realisasi Tahun 2022** | **Standar Akhir Periode Renstra** | **% Capaian** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=4/5\*100** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas. | Indeks Kepuasan Masyarakat . | 82,24 | **86,20** | **95,40 %** |
|  | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | 86,36 | **80** | **107,95** |
|  |  | Nilai Sakip Kecamatan. | 75,03 | **85** | **88,27** |

Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 sudah baik. Akan tetapi diperlukan adanya peningkatan dalam tata kelola pemerintahan yang andal, memuat kesederhanaan dalam prosedur pelayanan masyarakat agar tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat yang optimal. Selain itu peningkatan dalam kinerja pelayanan kecamatan dapat dioptimalkan melalui peningkatan manajaemen rencana kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi kinerja dalam mencapai sasaran kinerja organisasi untuk tahun-tahun kedepan nya agar realisasi kinerja pelayanan masyarakat dapat mencapai target.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**

**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tujuan/Sasaran** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **% Capaian** | **Analisis Keberhasilan/Kegagalan** | **Solusi yang dilakukan** |
|  | Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas. | Indeks Kepuasan Masyarakat . | 81,95 | 82,24 | 100,35% | Untuk realisasi capaian sudah mencapai 100,35 % dan sudah melampaui target 81,95 % | Mempertahankan kualitas kecepatan pelayanan dan peningkatan fasilitas pelayanan |
|  | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | 79 | 86,36 | **109%** | Capaian sudah mencapai target berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat Mandiri. | Mempertahankan kualitas kecepatan pelayanan dan peningkatan fasilitas pelayanan |
|  |  | Nilai Sakip Kecamatan. | 84 | 75,03 | **98,32%** | Dalam pemenuhan kecukupan dokumen dan implementasinya masih perlu di tingkatkan lagi. | Melengkapi, menyiapkan, memenuhi dengan tepat waktu dokumen dan implementasi di setiap permintaan dokumen |

Uraian penjelasan tabel :

Tingkat keberhasilan indeks kepuasan masyarakat sudah mencapai target dikarenakan sudah optimalnya petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan optimalnya pelaksanaan petugas dalam menjalankan tupoksinya, serta implementasi dalam kecukupam dokumen lebih ditingkatkan lagi untuk tahun-tahun kedepannya agar pelayanan masyarakat dapat lebih baik lagi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penyataan kinerja disajikan dalam tabel 3.7 berikut :

**Tabel 3.7**

**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tujuan/**  **Sasaran** | **Indikator Kinerja** | **% Capaian** | **Program/**  **Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | **% Capaian** |  |
|  | Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas. | Indeks Kepuasan Masyarakat . | 98,95 |  |  |  |  |
|  | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | 82 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 86,28 | Menunjang |
|  |  |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Layanan Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 92,99 | Menunjang |
|  |  |  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  | Menunjang |
|  |  |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 85,79 | Menunjang |
|  |  |  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 86,44 | Menunjang |
|  |  | Nilai Sakip Kecamatan. | 75,03 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | BB  75,03 | Menunjang |
|  |  |  |  |  | Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor) | 79 | Menunjang |

Uraian penjelasan tabel :

Tingkat keberhasilan program dan kegiatan Kecamatan Wungu secara keseluruhan sudah baik yang diukur berdasarkan indikator dari kinerja masing-masing program seperti program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga diperlukan pengoptimalan dari program ini. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan juga belum optimal karena adanya layanan pemberdayaan kurang merata sehingga perlu ditingkatkan. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sudah terlaksana dengan baik dari segi pelayanannya. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum saat ini sudah terlaksana dengan baik. Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa masih belum tercapai secara optimal sehingga kualitas pelayanannya perlu ditingkatkan lagi.

1. **Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**

**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tujuan/Sasaran** | **Indikator Kinerja** | | | | **Anggaran** | | | **Tingkat Esisiensi** |
| **Target** | **Realisasi** | **%Capaian** | **Anggaran** | | **Realisasi** | **%Capaian** |  |
| **(Rp.)** | | **(Rp.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
|  | Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas. | Indeks Kepuasan Masyarakat . | 82,24 | 100,35% | 183.889.641 | | 164.314.850 | 89,03% | Efisien 19.574.791  11,32 % |
|  | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | 86,36 | 109% |  | |  |  |  |
|  |  | Nilai Sakip Kecamatan. | 75,03 | **98,32%** | 357.786.022 | | 340.148.662 | 95,07% | Efisien 17.637.360  3,25 % |

Uraian penjelasan tabel :

Realisasi anggaran untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pelayanan kecamatan yang berkualitas memiliki anggaran sebesar 89,03% dimana anggaran yang dikeluarkan ini dapat dioptimalkan lagi untuk mencapai realisasi anggaran hingga sepenuhnya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**

**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | | | **Anggaran** | | | **Tingkat** |
| **No** | **Target** | **Realisasi** | **%Capaian** | **Anggaran** | **Realisasi** | **%Capaian** | **Efisiensi** |
|  |  |  |  |  | **(Rp.)** | **(Rp.)** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 100% | **94,94** | **95%** | 3.423.021.610 | 2.701.385.696 | 78,92 | Efisien  721.635.914  16.08% |
| **2** | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100% | **86,28** | **86%** | 6.207.024 | 5.355.400 | 86,28 | Efisien 851.624  0,27 % |
| **3** | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100% | **92,99** | **93%** | 86.906.088 | 80.815.450 | 92,99 | Efisien 6.090.638  0,01 % |
| **4** | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | **85,79** | **86%** | 49.397.800 | 42.377.000 | 85,79 | Efisien 7.020.800  0,21% |
| **5** | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | **86,44** | **86%** | 41.378.729 | 35.767.000 | 86,44 | Efisien 5.611.729 |
| **6** | Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | **96,78** | **97%** | 50.000.000 | 49.947.200 | 99,89 | Efisien 52.800  0,11% |

Uraian penjelasan tabel :

* + - * Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tingkat efisiensi anggaran yaitu 16,08 % dibuktikan dengan capaian kinerja yang sudah mencapai 95% meskipun anggaran yang terserap sebesar 78,92%
      * Pada Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tingkat efisiensi anggaran yaitu 0,27 % dibuktikan dengan capaian kinerja yang sudah mencapai 86% meskipun anggaran yang terserap sebesar 86,28%
      * Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tingkat efisiensi anggaran yaitu 0,01 % dan capaian kinerja yang sudah mencapai 93%, anggaran sudah terserap hingga 92,99%
      * Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tingkat efisiensi anggaran yaitu 0,21% dibuktikan dengan capaian kinerja yang sudah mencapai 86% meskipun anggaran yang terserap sebesar 85,79%
      * Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tingkat efisiensi anggaran yaitu 0% dibuktikan dengan capaian kinerja yang sudah mencapai 86% meskipun anggaran yang terserap sebesar 86,44%
  1. **Analisis Penggunaan Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**

**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program/Kegiatan** | **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **%Capaian** |
| **1** | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.423.021.610 | 2.701.385.696 | 78,92 |
| **2** | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 6.207.024 | 5.355.400 | 86,28 |
| **3** | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 86.906.088 | 80.815.450 | 92,99 |
| **4** | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 49.397.800 | 42.377.000 | 85,79 |
| **5** | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 41.378.729 | 35.767.000 | 86,44 |
| **6** | Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 50.000.000 | 48.445.000 | **96,89** |

Uraian penjelasan Tabel :

Berdasarkan tabel 3.8, dapat diketahui bahwa capaian anggaran dari masing-masing program dan kegiatan yang dimulai dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 78,92%, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sudah terealisasi sebesar 86,28% sehingga dapat dikatakan efektif namun perlu adanya pengoptimalan anggaran dalam program ini. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terealisasi sebesar 92,99% sehingga dapat dikatakan efektif namun perlu adanya pengoptimalan anggaran dalam program ini. Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sudah terealisai sebesar 85,79% sehingga dapat dikatakan efektif namun perlu adanya pengoptimalan anggaran dalam program ini. Porgram Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sudah terealisasi sebesar 86,44%. Dan program terakhir yaitu Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah terealisasi sebesar 96,89%.

* 1. **Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Pada Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Tahun 2021, Kecamatan Wungu memperoleh beberapa catatan terkait implementasi SAKIP, diantaranya :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Rekomendasi** | **Tindak Lanjut** |
| **1.** | Masih adanya ketidaksesuaian sasaran dan indikator sasaran yang diperjanjikan pada dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Perubahan Renstra. | Telah merevisi Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Tahun 2021 |
| **2.** | Masih perlunya koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun terkait penentuan target nilai SAKIP Kecamatan yang realistis untuk dicapai | Penentuan Target Nilai SAKIP sudah dilakukan perubahan dan berlaku untuk tahun 2024. ( Sesuai dengan RPD tahun 2024 - 2026. Terlampir ). |
| **3.** | Masih perlunya koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terkait keseragaman formula perhitungan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Pada tahun 2022 sudah dilakukan survey melalui E-Sukma ( Adapun Print out E Sukma terlampir ) |
| **4.** | Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi maka diperlukan penyesuaian dalam pengumpulan, pengukuran data kinerja, serta evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah internal Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dalam suatu sistem teknologi informasi | Untuk penggunaan aplikasi IT belum bisa ditindaklanjuti karena keterbatasan anggaran |
| **5.** | Masih perlunya penyempurnaan penyusunan dokumen LkjIP Tahun 2021 sesuai dengan Permenpan No. 53 Tahun 2014 dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, efisiensi serta kecermatan dalam menghitung efisiensi yang telah dilakukan. | Sudah melakukan perubahan pada LkjIP tahun 2021 dan melengkapi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, efisiensi serta kecermatan dalam menghitung efisiensi yang telah dilakukan. |
| **6.** | Masih perlunya peningkatan kualitas evaluasi internal dan laporan kinerja dengan menggali informasi ke penanggung jawab kegiatan/sub kegiatan terkait hambatan yang ada dalam pelaksanaan kinerja kegiatan dan merumuskan solusi/tindak lanjutnya | Sudah ditindaklanjuti dengan membuat form Evaluasi Internal . |
| **7.** | Belum tercapainya target IKU | Menyusun rancangan dan jadwal pemenuhan dokumen SAKIP supaya dokumen yang telah dikirimkan betul-betul sesuai dengan permintaan dan terpenuhi tepat waktu. Serta memasang barcode dan menyediakan petugas administrasi pelayanan untuk memberi pengarahan kepada masyarakat yang datang di kecamatan untuk meng-scan dan mengisi survey kepuasan atas layanan yang diberikan. |

**BAB IV**

**PENUTUP**

        Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Tahun 2022 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

        LKJIP Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

        Dalam tahun 2022 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun menetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

* Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 90% (kategori Baik )
* Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Baik )

        Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

        Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.606.911.251 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.865.700.546, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 serapan anggaran sebesar 79,45 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 741.210.705

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Madiun.

|  |
| --- |
| E:\1-LIA\BERKAS-BERKAS\ttd camat\ttd + stempel.jpegMadiun, 27 Februari 2023 |